

DAERAH – PENYIDIKAN – PPNS - PENCABUTAN

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 12 LD 2016/NO. 12 TLD NO. 26, SETDA KABUPATEN  
MAGELANG: 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, negara menjamin adanya kepastian hukum melalui penegakan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No.6 Tahun 2010, PP No.43 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang PPNS, Sekretariat PPNS, hak dan kewajiban PPNS, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS, kode etik PPNS, KTP dan atribut PPNS, pelaksanaan penyidikan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama. PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Penyidik, PPNS wajib menaati kode etik. Untuk peningkatan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2016.
  - Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 4 Halaman.